

Sistem Akuntansi Penggajian Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Nuryuli Windarningsih¹, Maria Magdalena Melani²

¹Universitas Djuanda, c.2110829@unida.ac.id

²Universitas Djuanda, maria.magdalena@unida.ac.id

ABSTRAK

Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan negara, khususnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Penggajian dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional Sistem Informasi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sukaraja dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini di Kantor Kecamatan Sukaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI berdampak positif dalam mempercepat proses administrasi penggajian, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan kepuasan pegawai. Namun, beberapa kendala teknis dan administratif masih ditemukan dalam penerapannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem serta dukungan teknis dan pelatihan bagi pengguna sangat di perlukan untuk mengoptimalkan fungsionalitas SIPD RI.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), SIPD RI, Kecamatan Sukaraja

PENDAHULUAN

Pengelolaan penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu komponen krusial dalam administrasi negara. Pada Kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pengelolaan gaji dilakukan melalui Sistem Informasi Akuntansi Penggajian yang bertujuan untuk memastikan ketepatan dan efisiensi dalam pembayaran gaji pegawai. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan mengolah data penggajian, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Pengimplementasian sistem informasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses administrasi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pegawai.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Republik Indonesia telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung efisiensi administrasi di tingkat daerah. Aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). SIPD RI dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi administratif, termasuk pengelolaan keuangan, anggaran, dan penggajian. Dengan adanya SIPD RI, diharapkan proses penggajian dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan tanpa adanya keraguan.

Kecamatan Sukaraja berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah pemekaran dengan Kecamatan Kedunghalang pada tahun 1995, Sukaraja terbentuk dari dua kecamatan: Kecamatan Bogor Utara berada di bawah naungan Kota Bogor, sementara Kecamatan Sukaraja masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bogor.

Banyak yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem penggajian pekerja di Indonesia. Dikarenakan masalah penggajian pegawai negeri dan pegawai swasta sangat sensitif dan berdampak politis yang signifikan bagi penyelenggara pemerintah, setiap bagian yang terkait harus menangani masalah ini dengan cara yang baik, tertib, dan teratur. Ini mencakup bagian keuangan di tempat kerja dan bagian staf sebagai sumber data. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk sebuah organisasi atau perusahaan, sistem informasi akuntansi (SIA) harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik.

Penerapan SIPD RI dalam sistem penggajian di Kecamatan Sukaraja tidak hanya memberikan dampak pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga pada aspek kepuasan pegawai. Kepuasan pegawai dalam menerima gaji yang tepat waktu dan sesuai haknya akan berdampak positif pada kinerja dan motivasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem dan prosedur penggajian menggunakan SIPD RI diterapkan di Kantor Kecamatan Sukaraja serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sistem ini.

Dengan latar belakang masalah yang terjadi di atas, dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), penulis tertarik mengangkat judul "Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor" sebagai topik kuliah kerja lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menentukan nilai satu atau lebih variabel (*independent*), tanpa melakukan perbandingan atau hubungan antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2008:11). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi penerapan sistem penggajian secara rinci, termasuk prosedur, hambatan, dan faktor-faktor pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penggajian Pada Kantor Kecamatan Sukaraja

Sistem penggajian yang sedang berjalan pada Kecamatan Sukaraja sudah berpedoman pada aplikasi berbasis digital yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Penggajian melibatkan beberapa rangkaian proses, yaitu:

1. Prosedur Badan Kepegawaian

Prosedur yang terdapat pada unit kerja sub bagian kepegawaian yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir

Prosedur pencatatan waktu yang ada di Kantor Kecamatan Sukaraja terdapat dua pencatatan waktu yaitu daftar absensi manual dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik).

2. Prosedur pada Bagian Keuangan

Prosedur yang terdapat pada unit kerja sub Program dan Pelaporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

a. Daftar Gaji

Untuk sebagian besar, daftar gaji pegawai di Kecamatan Sukaraja dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD juga memiliki tugas utama dalam mengelola keuangan daerah, termasuk menyusun dan membagikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh pemerintahan daerah. Pemda dan BPKAD bekerja sama untuk memastikan gaji diberikan dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Rekap Gaji Setelah diberikan daftar gaji dari BPKAD, bagian sub Program dan Pelaporan Keuangan, khususnya bendahara Kecamatan Sukaraja selanjutnya membuat rekap gaji karyawan dan memeriksa kembali daftar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah.

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Setelah membuat rekap gaji pegawai, SPP dibuat oleh bendahara keuangan Kecamatan Sukaraja. Didalam tahapan pembuatan SPP terdapat Nota Pencairan Dana (NPD) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Keduanya harus ada, jika tidak SPP tidak dapat dibuat.

c. Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah SPP dibuat, bendahara Kecamatan Sukaraja perlu menerbitkan SPM agar dana gaji tersebut dapat dicairkan.

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Setelah menerbitkan SPP dan SPM, bendahara keuangan Kecamatan Sukaraja menerima SP2D dari Bidang Pembendaharaan BPKAD sesuai dengan angka nominal yang tertera di SPP.

e. *Finish* atau Pencairan Gaji

Pencairan Gaji disini diajukan oleh Kecamatan Sukaraja setelah terbitnya SPP dan SPM, kemudian diajukan kepada BPKAD untuk di verifikasi. Kemudian, terbitlah SP2D yang disahkan oleh BUD BPKAD.

Bagian atau Fungsi Terkait

Dalam prosedur penggajian, terdapat beberapa bagian atau fungsi yang terkait untuk memastikan proses berjalan dengan lancar dan akurat. Berikut adalah komponen-komponen yang saling berkaitan dalam proses penggajian:

a. **Bagian Kepegawaian**

Bagian kepegawaian bertugas mengelola rekrutmen calon pegawai negeri sipil, memeriksa berkas pegawai seperti promosi dan mutasi, menyiapkan surat pemberhentian untuk pensiun, dan menyusun berkas absensi harian yang diverifikasi setiap akhir bulan. rekonsiliasi penggajian dilakukan oleh departemen SDM dan disampaikan melalui aplikasi SiCantik. Rekon gaji juga dilakukan oleh bagian kepegawaian yang nantinya akan diserahkan melalui aplikasi SiCantik.

b. **Bagian Keuangan**

Bagian keuangan bertanggung jawab untuk menerima Surat Keputusan (SK) dari bagian kepegawaian serta daftar gaji dari bidang pembendaharaan BPKAD. Tugas mereka mencakup pembuatan rekap gaji, menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari bidang pembendaharaan BPKAD Kabupaten Bogor.

Dokumen-dokumen yang digunakan

Untuk mengelola proses penggajian, Kecamatan Sukaraja mengandalkan dua dokumen penting:

1. **Daftar Gaji Pegawai**

Ini mencatat secara detail besaran gaji yang diterima setiap karyawan setelah dipotong berbagai komponen seperti iuran pensiun atau pajak. Pegawai akan menandatangani daftar ini sebagai bukti telah menerima gaji. Dokumen ini juga berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa pembayaran gaji telah dilakukan.

2. Rekap Gaji

Dokumen ini menyajikan ringkasan dari Daftar Gaji Pegawai, yaitu jumlah total gaji pokok, tunjangan, dan potongan-potongan yang berlaku untuk setiap golongan pegawai.

3. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji

Dokumen ini dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan terdiri dari surat-surat keputusan yang berkaitan dengan PNS, seperti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan pengangkatan sebagai PNS.

4. Konsep Gaji dan daftar Gaji bulan lalu yang telah diubah

Konsep gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan gaji bulanan adalah data lengkap pegawai, termasuk nama, jabatan, dan golongan, yang bekerja di Kantor Kecamatan Sukaraja.

5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat resmi yang berisi permintaan pencairan dana yang telah dialokasikan untuk suatu kegiatan tertentu.

6. Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM berfungsi sebagai surat permintaan pembayaran dana kepada kas daerah. Dokumen ini berisi data lengkap mengenai penerima pembayaran, jumlah yang diajukan, dan berbagai potongan yang berlaku. SPM yang telah disetujui akan menjadi dasar untuk pencairan dana.

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D berfungsi sebagai perintah untuk mencairkan dana dari kas daerah. Dokumen ini diterbitkan setelah SPM yang diajukan telah dinyatakan sah dan lengkap. SP2D menjadi dasar bagi bank untuk melakukan pencairan dana ke rekening penerima.

8. Slip Gaji

Slip gaji adalah tanda penerimaan gaji yang diberikan kepada karyawan. Di dalamnya tercantum rincian penghasilan yang diterima, termasuk jumlah gaji pokok dan berbagai potongan yang telah dibebankan.

Pencatatan Akuntansi yang Digunakan

Untuk memastikan pengelolaan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Sukaraja berjalan akurat dan transparan, beberapa catatan keuangan penting digunakan sebagai acuan. Catatan-catatan ini berfungsi untuk melacak seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembayaran gaji.

- a. Cek: Digunakan untuk memantau jumlah dana yang dikeluarkan setiap bulan untuk pembayaran gaji kepada PNS.
- b. Buku Kas Umum (BKU): Buku ini adalah catatan keuangan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu instansi, termasuk di tingkat kecamatan.
- c. Register SPP: Dokumen ini dikelola oleh akuntan dan berfungsi untuk mencatat serta mengarsipkan SPP.
- d. Register SPM: Dokumen ini disusun oleh akuntan untuk mencatat dan menyimpan arsip SPM.

Sistem Penggajian Pada Kantor Kecamatan Sukaraja

Sistem aplikasi yang dipakai dalam melakukan Input Gaji pada Kantor Kecamatan Sukaraja adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar pembentukan SIPD RI. Sistem ini secara aktif mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari pengumpulan usulan masyarakat hingga penetapan RKPD. SIPD juga memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.



Sumber: SIPD Kemendagri, 2024

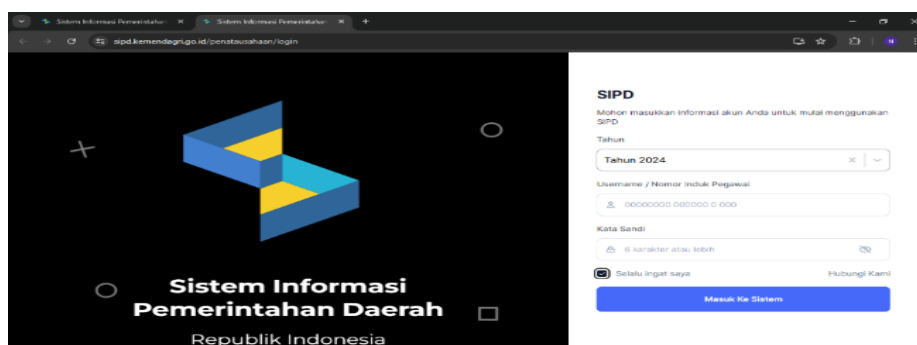
Gambar: 3.1 Tampilan SIPD RI

Tahapan Proses Penggajian Melalui Aplikasi SIPD RI

Berdasarkan Modul Penatausahaan SIPD RI, berikut merupakan tahapan-tahapan proses penggajian melalui aplikasi SIPD RI pada Kantor Kecamatan Sukaraja:

1. *Login/Masuk*

Masuk menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP).



Sumber: SIPD Kemendagri, 2024

Gambar 3.2 Tampilan *Login* SIPD RI

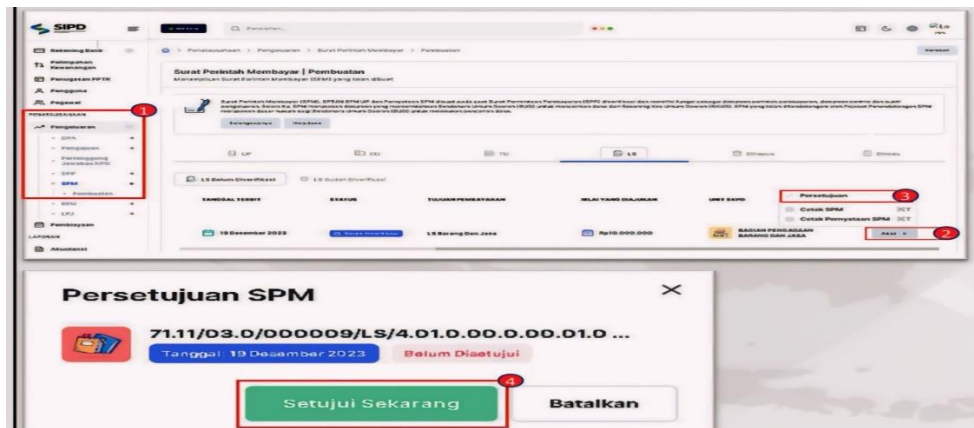
2. *Upload* Data Pegawai

Pengunggahan data pegawai dapat dilakukan dengan memilih menu Pengeluaran - Daftar Rekanan untuk membuka halaman daftar rekanan. Isi data-data yang diperlukan pada formulir Tambah Mitra, yang mencakup informasi mitra dan informasi pembayaran. Kemudian, klik Simpan untuk menyimpan data mitra tersebut.

3. Pembuatan SPP

Mulai proses pembuatan SPP LS dengan mengakses menu Biaya. Setelah itu, pilih opsi SPP dan kemudian LS. Isi formulir yang tersedia dengan lengkap untuk menyelesaikan pembuatan SPP LS.

4. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). Pilih menu Pengeluaran – SPM-Pembuatan.



Sumber: Modul SIPD RI, 2024

Gambar 3.3 Tampilan Pembuatan SPM

5. Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Untuk membuat SP2D, buka menu Pengeluaran, pilih SP2D, lalu klik Tambah SP2D. Isi formulir yang muncul dengan data dari SPM, tanggal, rekening, keperluan, dan tanda tangan. Setelah itu, simpan dengan mengklik Tambah SP2D Sekarang.

6. Verifikasi SP2D

Setelah diterbitkan, SP2D akan diverifikasi oleh BPKAD melalui sistem. Untuk memverifikasi SP2D, pilih menu Keluaran - SP2D – Verifikasi . Pilih SP2D yang akan diverifikasi, kemudian klik Verifikasi dan pilih Setujui. Setelah itu, status SP2D akan berubah menjadi terverifikasi.

7. Pencairan SP2D

Setelah diverifikasi, SP2D akan dicairkan dan dikirimkan ke bendahara Kecamatan. Untuk mencairkan SP2D melalui akun kuasa BUD, ikuti langkah-langkah berikut:

- **Cari SP2D:** Buka menu Pengeluaran, lalu pilih SP2D yang akan dicairkan.
- **Konfirmasi:** Periksa kembali data SP2D yang akan ditransfer.
- **Transfer Dana:** Klik tombol untuk memulai proses transfer.
- **Selesai:** Sistem akan menunjukkan bahwa SP2D telah berhasil ditransfer.

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Informasi Penggajian di Kecamatan Sukaraja

Sebelum sistem penggajian digital digunakan, gaji pegawai dibayar melalui proses manual yang memiliki banyak keterbatasan. Banyak pekerjaan manual yang dilakukan secara manual termasuk menghitung gaji, membuat slip gaji, dan memberikan gaji secara tunai.

Selain itu, penggajian manual memerlukan verifikasi berlapis untuk memastikan bahwa semua data sudah benar. Ini menyebabkan penggajian menjadi lebih lama dan memakan waktu beberapa hari sampai beberapa minggu sebelum gaji diterima. Kondisi ini sering menyebabkan pembayaran gaji tertunda, yang berdampak negatif pada motivasi dan kinerja pegawai. Karena keterbatasan ini, banyak orang mulai menyadari bahwa sistem penggajian harus diubah untuk menjadi lebih akurat dan efisien.

Dalam proses penggajian, keterlambatan pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pernah terjadi akibat tingginya beban kerja tenaga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Petugas BPKAD mungkin diminta untuk menyusun laporan keuangan atau audit internal pada akhir bulan atau tahun anggaran. Selain itu, jadwal yang padat dari pejabat yang berwenang sering menyebabkan penandatanganan dokumen penting tertunda. Akibatnya, proses pencairan gaji dapat tertunda hingga dua hari dari tanggal jatuh tempo. Meskipun penundaan ini tidak signifikan, hal itu dapat berdampak pada pengaturan keuangan pribadi pegawai yang sudah merencanakan untuk membayar kebutuhan mereka sesuai dengan jadwal gaji mereka yang biasa.

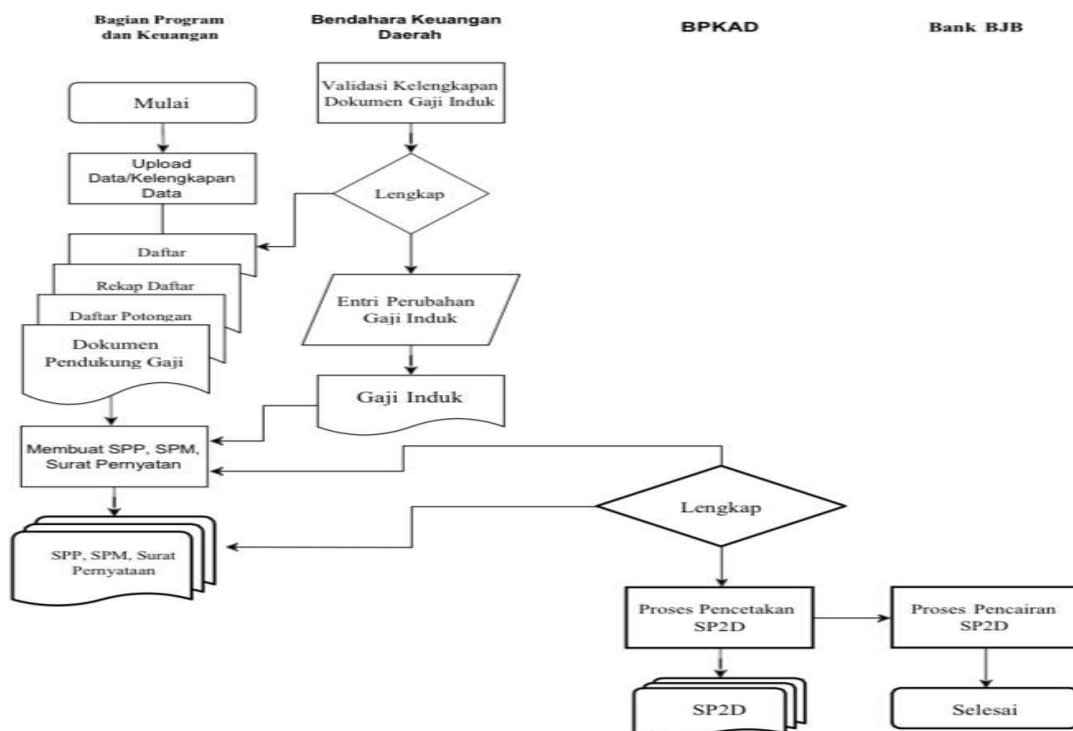
Walaupun SIPD RI yang diterapkan di Kecamatan Sukaraja lebih maju dari sistem terdahulunya, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL), namun dalam penggunaannya masih menghadapi berbagai kendala. SIPD RI merupakan sistem yang baru berjalan kurang lebih satu tahun sejak peluncurannya.

Salah satu masalah utama adalah stabilitas sistem yang masih kurang optimal. Sistem seringkali lambat diakses, bahkan sering mengalami *error*. Misalnya, saat sistem diakses selama satu jam, pengguna hanya dapat menggunakannya secara efektif selama 15 sampai 30 menit. Hal ini tentu saja menghambat proses kerja dan efisiensi dalam pengelolaan penggajian pegawai.

Kendala-kendala ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemungkinan adanya bug dalam sistem atau infrastruktur jaringan yang belum memadai. Selain itu, karena SIPD RI merupakan sistem yang baru berjalan kurang lebih satu tahun sejak peluncurannya, kemungkinan besar masih dalam tahap penyesuaian dan perbaikan. Pengguna sistem di Kecamatan Sukaraja kemungkinan masih dalam proses penyesuaian terhadap sistem yang baru. Sehingga membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami dan menguasai cara pengoperasiannya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pengembang dan pengelola sistem untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, serta menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai bagi para pengguna di lapangan.

Bagan Alir (Flowchart)

Tabel 3.1 Bagan Alir (Flowchart)



Sumber: Data Diolah (2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada Kantor Kecamatan Sukaraja dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penggajian pegawai PNS di Kecamatan Sukaraja saat ini telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). Sistem ini memungkinkan pencatatan data pegawai, perhitungan gaji, hingga pencairan gaji dilakukan secara efisien dan terstruktur. Prosedur penggajian ini melibatkan beberapa bagian seperti bagian kepegawaian dan bagian Program dan Pelaporan Keuangan yang bertugas untuk memastikan proses penggajian berjalan dengan lancar dan akurat. Adapun dokumen-dokumen pendukung seperti daftar gaji, rekap gaji, dan slip gaji juga digunakan dalam proses ini. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan antara lain, seperti cek, Buku Kas Umum (BKU), register SPP, SPM dan SPJ. Dan tahapan utama dalam proses penggajian melalui SIPD RI meliputi input data pegawai, pembuatan dokumen keuangan, verifikasi, dan pencairan gaji.
2. Dalam proses penggajian, kendala yang di alami Kecamatan Sukaraja salah satunya adalah keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di karena tingginya beban kerja staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terutama pada akhir bulan atau tahun anggaran, serta jadwal padat pegawai yang berwenang menandatangani dokumen. Penundaan ini bisa mencapai dua hari dari tanggal jatuh tempo, mempengaruhi proses gaji pegawai. Selain itu meskipun SIPD RI menawarkan berbagai keunggulan, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Stabilitas sistem yang sering mengalami gangguan, seperti lambat diakses dan sering eror, menghambat efisiensi kerja. Selain itu, karena SIPD RI baru berjalan kurang lebih satu tahun, masih terdapat

banyak penyesuaian dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). **Luas Wilayah (Km²)**, 2021-2023.

<https://bogorkab.bps.go.id/>.

Panduan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). (2016). Bogor. Fakultas Ekonomi-
Universitas Djuanda Bogor

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. (2023). Dikutip dari

<https://contohweb.banjarasinkota.go.id/2023/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun.html>

Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Bisnis**. Alfabeta : Bandung.